

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat
JL. Gedebage Selatan No. 117, Kec. Gedebage, Kota
Bandung, Jawa Barat



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT
Alamat : Jl. Gede Bage Selatan No.117 Rancabolang - Gedebage Telp. (022) 7567715
Fax. (022) 7535107
BANDUNG - JAWA BARAT 40294

PERATURAN
KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT
Nomor : SK. 42 /K.1/TU/Prog/1/2024

TENTANG
RENCANA KERJA BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT TAHUN 2024

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Rencana Kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri LHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri LHK Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atau peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor. S.K.217/KSDAE/SET.3/REN.2/12/2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT TENTANG RENCANA KERJA BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT TAHUN 2024.**

Pasal 1

Rencana Kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di seluruh bagian lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Pasal 3

Peraturan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Januari 2024
Kepala Balai Besar,



Irawan Asaad, S.T.,M.Sc., Ph.D
NIP. 19750615 200212 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT
Nomor : SK. 42 /K.1/TU/Prog/1/2024

TENTANG
RENCANA BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2024. Rencana Kerja tahun 2024 ini disusun secara paralel dengan proses penyusunan R-APBN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, sehingga dapat memperkuat internalisasi pembangunan nasional ke dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Penetapan Dokumen ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Balai Besar KSDA Jawa Barat. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Dokumen Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Besar harapan kami bahwa Renja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024 ini dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran strategis dapat tercapai dalam rangka mewujudkan indikator kinerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2020-2024.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Balai Besar KSDA Jawa Barat ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran.

Bandung, Januari 2024

Kepala Balai Besar,



Irawan Asaad, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19750615 200212 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. BBKSDA Jawa Barat mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek legalitas BBKSDA Jawa Barat selaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diatur oleh Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK. 171/MenLHK- II/2015 tanggal 15 Juni 2015.

BBKSDA Jawa Barat sebagai salah satu UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah wajib mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, BBKSDA Jawa Barat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, sebagai salah satu bentuk perencanaan pada tahun yang akan berjalan.

Rencana Kerja Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari program pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Jenderal KSDAE dalam kurun waktu 2020-2024, yaitu: (1) meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati; (2) meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; (3) meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari; (4) meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi; dan (5) meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar KSDA Jawa Barat pada Tahun 2024 sebagaimana pagu alokasi tahun 2024, direncanakan sebesar sebesar Rp. 38,420,502,000,- (Tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua ribu rupiah). Pagu alokasi anggaran untuk direncanakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran dalam rangka pencapaian target-target prioritas yang telah ditetapkan.

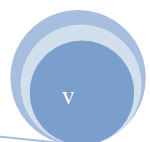
Renja ini merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis BBKSDA Jawa Barat, yang hingga saat ini penyusunannya masih mengacu pada rancangan teknokratik. Renja ini tetap merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi.....	7
C. Arah Kebijakan KSDAE Tahun 2024	9
D. Program dan Kegiatan.....	13
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	18
A. Capaian Kinerja s/d Tahun 2023	18
B. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2024	37
BAB III. RENCANA KERJA	40
A. Rencana Kerja.....	40
B. Pengukuran Kinerja	42
C. Pembiayaan	43
BAB IV. PENUTUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat 2020-2024	16
Tabel 2.	Capaian Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.	Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2024	38
Tabel 4.	Indikator Kinerja dan Komponen Kegiatan Pencapaian Kinerja	40



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2020-2024 diharapkan target-target sasaran akhir akan tercapai. Tahun 2024 juga diharapkan akan menjadi landasan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025- 2029. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi pedoman/acuan dalam pemutakhiran dan penyusunan rencana kerja unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia; (2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjaga kelestariannya.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE Tahun 2024 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

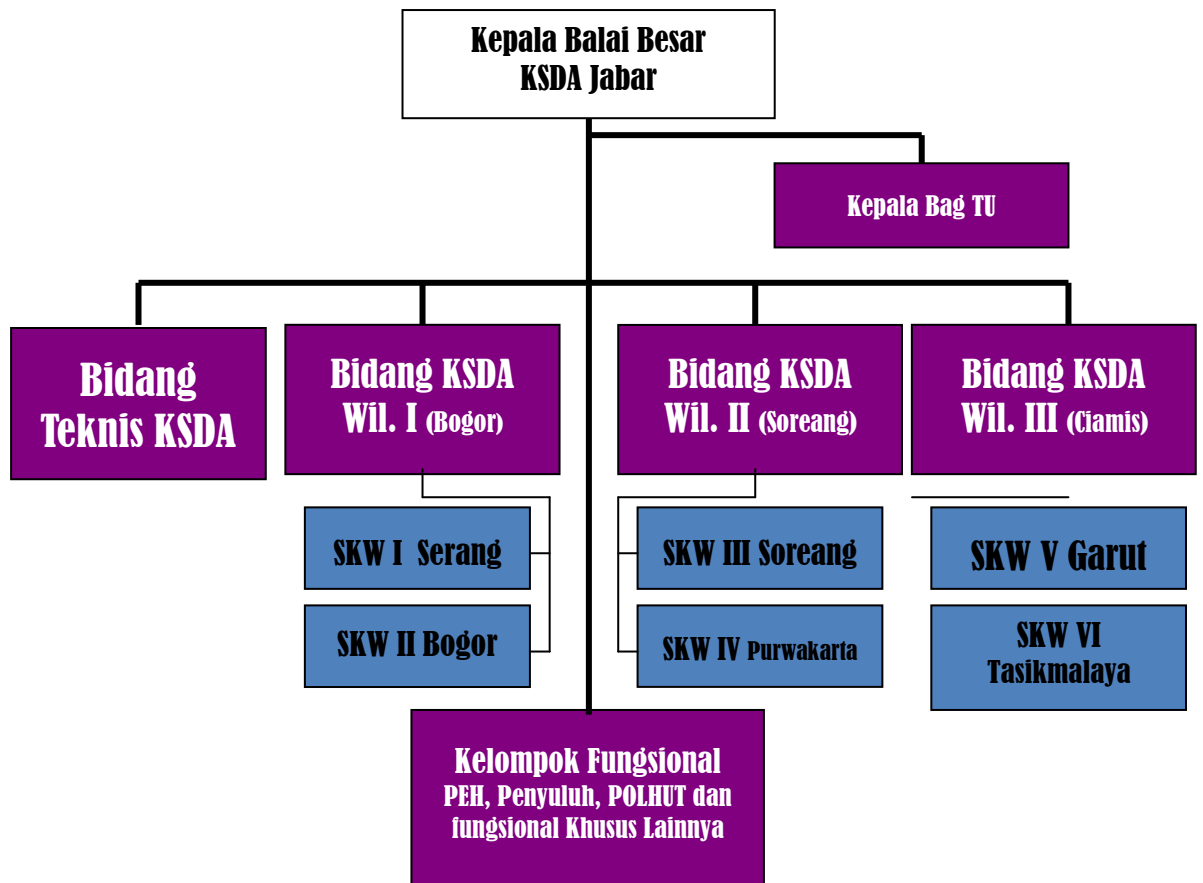
BBKSDA Jawa Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah wajib mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan

baik, BBKSDA Jawa Barat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, sebagai salah satu bentuk perencanaan pada tahun yang akan berjalan.

Rencana Kerja Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari program pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, Balai Besar KSDA Jawa Barat termasuk dalam tipe A dengan kedudukan di Bandung, membawahi 3 (tiga) Bidang Wilayah yaitu Bidang Wilayah I di Bogor, Bidang Wilayah II di Soreang dan Bidang Wilayah III di Ciamis, serta 6 (enam) Seksi Konservasi Wilayah. Sedangkan yang berkedudukan di kantor terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambarkan dalam struktur Organisasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBKSDA Jawa Barat

Balai Besar KSDA Jawa Barat mempunyai tugas menyelenggarakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi yang diemban adalah:

1. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi
2. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
3. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
4. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
5. Pengendalian kebakaran hutan;

6. Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
7. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
8. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
9. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
10. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
12. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
13. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
14. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Arah Kebijakan KSDAE Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024, diharapkan target-target sasaran akhir akan tercapai. Tahun 2024 juga diharapkan akan menjadi landasan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025- 2029. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi pedoman/acuan dalam pemutakhiran dan penyusunan rencana kerja unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan nasional masih mengalami tekanan, Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid- 19, sedangkan pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap untuk mencapai *herd immunity* dan terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 menuju pencapaian *herd immunity*. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Pada awal tahun 2022, berbagai upaya pemulihan ekonomi global dan peredaman *scarring effect* pasca pandemi

kembali menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Upaya pemulihan pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi menjadi agenda bersama seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan sejak tahun 2023 dan akan diakselerasi pada tahun 2024. Aktivitas perekonomian di tahun 2023 diperkirakan sudah kembali pada kondisi normal seiring dengan penanganan intensif di bidang kesehatan untuk mencapai *herd immunity* pada tahun 2022. Transformasi ekonomi dilaksanakan melalui tiga pilar yaitu, (a) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (b) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta (c) perluasan akses dan kesempatan kerja. Proses penyusunan RKP dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Sementara itu secara substantif RKP disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 telah ditetapkan Visi Pembangunan Tahun 2024, yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema RKP Tahun 2024 berfokus pada percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mempertimbangkan capaian RPJMN 2020-2024, arahan presiden, hasil evaluasi pembangunan Tahun 2022, evaluasi kebijakan Tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 difokuskan pada strategi pencapaian target pembangunan jangka menengah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional-PN) yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, strategi pelaksanaan dengan tetap melanjutkan pelaksanaan 44 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project-MP*) dengan

daya ungkit tinggi. Keberlanjutan dan penambahan *Major Project* tersebut diperlukan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun 2020–2024.



Gambar 2. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Prioritas Nasional 1, Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 6, serta Major Project Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas.

Ditjen KSDAE mendukung pelaksanaan ketentuan PUU IKN terkait dengan Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perubahan Iklim Tim Transisi Ibu Kota Nusantara melalui beberapa kegiatan yaitu : (1) melakukan pemetaan target kinerja melalui analisis peta dan data lokasi pelaksanaan IKN sesuai RPJMN 2020-2024 pada Kawasan Konservasi; (2) melakukan inventarisasi dan verifikasi kehati tinggi baik melalui groundcheck potensi kehati, analisis data sekunder, dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; (3) menyusun Rencana Pemulihan Ekosistem berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi kehati tinggi; (4) membangun dan mengelola sarana prasarana seperti Pembangunan Pusat Plasma Nutfah, dll; (5) melakukan verifikasi dan pelaporan untuk menetapkan rekomendasi kawasan dengan kehati tinggi dan pelaksanaan pengelolaan IKN Lingkup Ditjen KSDAE.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Prioritas Nasional 1,

Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 6, serta Major Project 10 Destinasi peningkatan wisatawan domestik dan mancanegara, peningkatan pemasaran wisata, dan percepatan kesiapan destinasi khususnya pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), yang mana 3 (tiga) destinasi diantaranya merupakan Kawasan Konservasi yaitu DPP Labuan Bajo (Taman Nasional Komodo), DPP Bromo Tengger Semeru (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru), DPP Wakatobi (Taman Nasional Wakatobi), serta Taman Nasional lainnya yang berada di sekitar Destinasi Pariwisata Prioritas seperti DPP Danau Toba yang didukung oleh Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis, DPP Kepulauan Seribu yang didukung oleh Taman Nasional Kepulauan Seribu, DPP Borobudur yang didukung oleh Taman Nasional Merapi dan Taman Nasional Merbabu di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, DPP Banyuwangi didukung oleh Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Meru Betiri, DPP Likupang-Manado yang didukung oleh Taman Nasional Bunaken, DPP Makassar-Selayar yang didukung oleh Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan Taman Nasional Taka Bonerate, serta DPP Mandalika yang didukung oleh Taman Nasional Rinjani. Selain Taman Nasional, masih ada beberapa Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang juga mendukung penyiapan Destinasi Pariwisata Alam Prioritas tahun 2020-2024.

Dalam pencapaian target kinerja, khususnya yang terkait dengan Prioritas Nasional dan Major Project, penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Major Project (MP); (3) menjadikan konsep pelaksanaan kegiatan dilakukan secara spasial dan didukung oleh multipihak; dan (4) mengintegrasikan sumber- sumber pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2024 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi Satuan Kerja

(Satker) lingkup Ditjen KSDAE dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satker serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.

D. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menetapkan Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu: (1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati, (2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL. (3) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. (4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan (6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Terdapat tujuh kegiatan yang diemban Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem selama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya dan Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi. Rincian output yang di laksanakan adalah Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya dengan target satu rekomendasi kebijakan. Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

2. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas, Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam, Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* dan Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari.

Rincian output yang di laksanakan adalah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan (target: satu layanan), Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata - Wisata Alam, SAVE, dan Bahari (target tiga kelompok masyarakat), Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang Dikembangkan (target: satu unit) dan Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi (target: satu unit). Keseluruhan target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024, dengan beberapa target diharapkan terealisasi di triwulan ketiga.

3. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Luas Kawasan Hutan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Tinggi secara Partisipatif dan Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang Dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi. Rincian output yang di laksanakan adalah Kawasan Konservasi yang Dilakukan Penetapan (Prakondisi) Status dan Fungsi untuk Peningkatan Nilai Efektivitas (dengan target sebanyak satu unit KK) dan Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (target seluas 11.000 hektare). Kedua target dimaksud tersebut diharapkan dapat dicapai pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024.

4. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Luas Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang Ditangani, Jumlah Kawasan Konservasi yang Dinilai Efektivitas Pengelolaannya, Jumlah Desa di Kawasan Konservasi Yang Mendapatkan Akses Pemanfaatan KK, Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi Melalui Kemitraan Konservasi. Rincian output yang di laksanakan adalah Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (dengan target sebanyak 71 Unit KK), Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi (target: 25 Lembaga) dan Pengembangan Kader Kerservasi (dengan target sebanyak Lima Orang).

Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

5. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Luas Kawasan Hutan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif, Jumlah Sistem/Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jumlah Entitas Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL, Jumlah Entitas Perlindungan dan Pengawetan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL, Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang Dibangun dan Jumlah Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati. Rincian output yang di laksanakan adalah Entitas Perlindungan, dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang Dikembangkan (target sebanyak 52 Lembaga), Entitas Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik TSL yang dikembangkan (Koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta) (target sebanyak 40 lembaga) dan Entitas Perlindungan, Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang Dikembangkan (dengan target 12 Lembaga). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

6. Kegiatan Pemulihan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Luas Kawaaankosistem yang dipulihkan. Rincian output yang di laksanakan adalah Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi (dengan target seluat 905,19 hektare). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

7. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem, Level Maturitas SPIP dan Opini WTP atas Laporan Keuangan. Rincian output yang di laksanakan adalah Layanan Umum (1 Layanan), Layanan Perkantoran (1 layanan). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, Direktorat Jenderal KSDAE cq. BBKSDA Jawa Barat melaksanakan Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, dari program tersebut adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati diharapkan berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis, penggerak ekonomi, serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global.

Sasaran kegiatan dan target Indikator kinerja kegiatan (IKK), dari Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0
		Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	1	1	3	3	3
		Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	1	1	1	2	1
2	Pembinaan pengelolaan Ekosistem Esensial	Luas kawasan sebagai penyedia Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Luar Kawasan Konservasi	8	-	169.800	-	68.487
		Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1	3	2	2	-
3	Perencanaan Kawasan Konservasi	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	-	7.864	45.097	11.000	38.358
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	-	3	3	-	-
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan	-	-	-	1	1
		Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	1	-	-	1	1
4	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	19	17	18	21	30

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	-	90	-	500	-
		Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	-	-	-	5	4
		Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	-	-	-	21	21
		Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	1	24	76	24	24
		Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	342	1.143	-	100	2.518
		Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	-	-	-	48	48
5	Konservasi Keaneekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keaneekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	5	10.381	214.897	208.548	10.099
		Jumlah entitas pemanfaatan keaneekaragaman spesies dan genetik TSL	2	36	36	40	46
		Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keaneekaragaman spesies dan genetik TSL	-	2	2	12	27
		Jumlah penyelamatan satwa liar	-	-	-	10	6
6	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	1	1	1	1	1
		Jumlah Destinasi Wisata alam Prioritas	-	3	3	-	1
		Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	-	-	1	-	-
		Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa lingkungan Panas bumi dan Karbon	-	-	-	-	1
7	Pemulihan Ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	-	-	-	905,19	200

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya dengan tujuan perbaikan dan peningkatan kinerja yang belum optimal, dapat dijadikan tolak ukur perencanaan tahun berikutnya, serta melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal KSDAE. Sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, evaluasi Rencana Kerja Ditjen KSDAE sampai dengan tahun 2022 dan prognosis capaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan hierarki sasaran di setiap tingkatan kinerja yang ditampilkan pada setiap Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta capaian kinerja anggaran dalam pencapaian IKP dan IKK dimaksud. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, untuk memudahkan penilaian tingkat keberhasilan, maka perlu dibuat notifikasi capaian kinerja berdasarkan capaian masing-masing indikatornya

Notifikasi	Warna	Kriteria Notifikasi	Kategori
●	Hijau	Apabila target tercapai > 95 %	Sudah tercapai atau On Track/On Trend
●	Kuning	Apabila mencapai target <95% dan > 75%	Perlu kerja keras
●	Merah	Apabila target mencapai <75%	Sulit tercapai

A. Capaian Kinerja s/d Tahun 2023

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat, dilakukan pengukuran kinerja melalui penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Di samping itu, dalam pengukuran capaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat diberlakukan pembatasan nilai maksimal, yaitu sebesar 100% mengingat adanya beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sangat tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya bias dalam penghitungan

pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja BBKSDA Jawa Barat, capaian kinerja masing-masing sasaran strategis/*outcome* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Realisasi	Notifikasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	- Layanan umum - Layanan perkantoran	79.5 Poin	79,88 poin	●
		Level Maturitas SPIP Ditjen	- Layanan umum - Layanan perkantoran	Level 3	Level 3	●
		Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	- Layanan umum - Layanan perkantoran	2 Dokumen	2 Dokumen	●
2	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	11.000 Hektar	26.019,22 Hektar	●
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	1 Unit KK	1 Unit KK	●
		Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	1 Dokumen	1 Dokumen	●
3	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	21 Desa	25 Desa	●
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	500 Hektar	500 hektar	●

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Realisasi	Notifikasi
		Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alain	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	5 Orang	5 Orang	●
		Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	21 kelompok	1 kelompok	●
	Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	24 Unit KK	24 Unit KK	●
		Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Penanganan Konflik Tenurial	100 Hektar	100 hektar	●
		Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	48 Unit	48 Unit	●
4	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	208.548 Hektar	310.238,18 hektar	●
	Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	40 entitas	43 entitas	●
	Terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL secara lestari	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	12 entitas	12 entitas	●

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Realisasi	Notifikasi
		Jumlah penyelamatan satwa liar	Penyelamatan Satwa Liar	10 Kejadian	17 kejadian	●
5	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary. Education	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang dikembangkan	1 Destinasi	1 Destinasi	●
6	Meningkatnya pemulihan ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	905,19 Hektar	1.501,64 Hektar	●
7	Meningkalnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosisten esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	KEE yang difasilitasi untuk peningkatan Efektivitas Pengelolaan	2 Unit KEE	2 Unit KEE	●

Dalam 3 program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki kewajiban untuk memenuhi 10 Sasaran Kegiatan, 18 IKK dan 19 Rincian Output pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja (Tabel 2), dari 10 Sasaran Kegiatan, 18 IKK 19 Rincian Output yang telah ditetapkan, 17 IKK di antaranya meraih kinerja sangat baik dengan persentase capaian kinerja $\geq 100,00\%$, menunjukkan bahwa kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam mewujudkan target kinerja organisasi pada tahun 2023 secara umum telah berjalan dengan baik. Berikut ini penjelasan terkait pencapaian masing-masing IKK.

1. IKK 1 : Nilai SAKIP Ditjen KSDAE minimal 79,5 poin

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan

dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja itu sendiri merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Guna mendukung capaian IKK 1, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp.27.397.736.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) dengan realisasi 98,7% atau sebesar Rp.27.042.099.669,- (dua puluh tujuh milyar empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, anggaran, evaluasi, data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum serta layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai.

2. IKK 2 : Level Maturitas SPIP pada level 3

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bentuk pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 12 ayat (1) huruf c memuat klausul pelaksanaan SPIP dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai ukuran tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Guna mengetahui level atau tingkat kematangan pelaksanaan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian, dilaksanakan penilaian mandiri maturitas oleh setiap

Satker/UPT.

Pada tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target level maturitas SPIP pada level 3. Guna mendukung capaian IKK 2, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp.27.397.736.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) dengan realisasi 98,7% atau sebesar Rp.27.042.099.669,- (dua puluh tujuh milyar empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, anggaran, evaluasi, data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum serta layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai.

3. IKK 3 : Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 2 dokumen

Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target laporan keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 2 dokumen. Guna mendukung capaian IKK 2, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp.27.397.736.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) dengan realisasi 98,7% atau sebesar Rp.27.042.099.669,- (dua puluh tujuh milyar empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, anggaran, evaluasi, data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum serta layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai.

Pada tahun 2023 telah disusun laporan keuangan periode tahun anggaran 2022, Semester I tahun anggaran 2023 dan Triwulan III tahun anggaran 2023, dengan kata lain target kinerja Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 2 dokumen dapat dicapai. Kualitas laporan keuangan yang baik adalah laporan yang dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan laporan keuangan. Laporan keuangan BBKSDA Jabar diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. IKK 4 : Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 11.000 Hektar

Pada tahun 2023, Balai Besar KSDA Jawa Barat mendapatkan target untuk luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 11.000 ha. Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam mencapai target tersebut memperoleh anggaran sebesar Rp.389.585.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi 99,6% atau sebesar Rp.388.032.900,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan data inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan kawasan konservasi berupa verifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem dengan mekanisme *on desk study* dan *groundcheck*.

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi diawali dengan langkah pendahuluan berupa identifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem untuk mengetahui lokasi open area terkini melalui data tutupan lahan yang selanjutnya dilakukan langkah verifikasi baik secara *desk study* maupun *ground check* atau pengecekan langsung di lapangan untuk memperoleh data tutupan lahan terbaru pada setiap kawasan.

Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif melalui kegiatan verifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem yang telah melalui tahapan tinjauan lapangan/*ground check* adalah seluas 26.019,22 ha (dua puluh enam ribu sembilan belas koma dua puluh dua) dengan capaian sebesar 150%.

5. IKK 5 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan sebanyak 1 unit KK

Tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat mendapatkan target sebanyak 1 Unit Kawasan Konservasi yang akan dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan. Dalam memenuhi target IKK tersebut, Balai Besar KSDA Jawa

Barat disediakan anggaran sebesar Rp.547.970.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 97,37% atau sebesar Rp.533.573.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, antara lain :

1. Penataan KK dan penandaan zona atau blok
 - a. Penandaan batas blok *enclave* Cihalimun dan Cipacet CA Gunung Simpang
 - b. Pemeliharaan jalur batas kawasan konservasi
 - c. Penyusunan/revisi blok CA/TWA Talaga Bodas
2. Rencana pengelolaan kawasan konservasi
 - a. Finalisasi dokumen RPJP KPHK Simpang Tilu
 - b. Penyusunan dokumen RPJP CA Nusa Gede Panjalu, SM Gunung Sawal
 - c. Penyusunan RPJP kawasan konservasi lingkup BBKSDA Jabar
 - d. Finalisasi EKF Guntur Papandayan

Capaian untuk IKK jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan tercapai sebanyak 1 unit kawasan konservasi (100%).

6. IKK 6 : Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (1 Dokumen tata Kelola kerja sama lingkup BBKSDA Jabar)

Penyelenggaraan kerjasama telah memberikan hasil positif di dalam mendukung efektivitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi serta mendukung pembangunan untuk ketahanan nasional. Selama tahun 2023 jumlah dokumen kerjasama yang ditandatangani sebanyak 2 dokumen yang terdiri dari dokumen perjanjian kerjasama penguatan fungsi sebanyak 1 dokumen dan dokumen perjanjian kerjasama pembangunan strategis sebanyak 1 dokumen.

Pada tahun 2023, Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target 1 dokumen tata Kelola kerja sama dengan anggaran sebesar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar

99,18% atau sebesar Rp.96.055.300,- (sembilan puluh enam juta lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan komponen kegiatan pencapaian IKK kerjasama penyelenggaraan KSA atau KPA yang dilakukan dalam mendukung capaian IKK 6 pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penandatanganan PKS;
2. Monitoring atau fasilitasi kegiatan kerjasama penguatan fungsi dan strategis;
3. Evaluasi kerjasama.

7. IKK 7 : Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejumlah 21 Desa

Pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi baik Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dalam rangka mendukung kelestarian KSA dan KPA. Berdasar pada tujuan sebagaimana diamanatkan peraturan dan perundang-undangan, pendampingan terhadap masyarakat desa sekitar menjadi satu diantara hal-hal penting dalam proses pemberdayaan masyarakat

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mencapai IKK 2020-2024 adalah jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara akumulatif sejumlah 105 desa. Target desa dimaksud merupakan desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan dan atau desa penyangga yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan konservasi namun masyarakatnya memiliki interaksi kuat dengan kawasan konservasi.

Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.960.455.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), terealisasi 99,96% atau sebesar Rp.1.959.656.550,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan komponen kegiatan pengembangan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses pembentukan dan penyusunan rencana kelompok dan fasilitasi kesepakatan konservasi. Kegiatan fasilitasi pendampingan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui tahapan pendampingan desa binaan, monitoring dan evaluasi pendampingan masyarakat. Kegiatan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi yang meliputi pengembangan usaha ekonomi kelompok melalui pemberian bantuan pengembangan/peningkatan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas pendamping desa, sosialisasi pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat, bimtek bagi pendamping lingkup BBKSDA Jabar dan peningkatan kapasitas penyuluh dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, dapat disampaikan target IKK 7 tercapai 100%.

8. IKK 8 : Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi seluas 500 hektar

Berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024), IKK luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi memiliki target seluas 590 ha, dengan target tahun 2021 seluas 90 ha dan tahun 2023 seluas 500 ha. Target tersebut sama dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BBKSDA Jabar tahun 2023 bahwa target untuk IKK luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi adalah seluas 500 ha.

Guna mencapai target tersebut BBKSDA Jabar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.270.275.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terealisasi 99,95% atau sebesar Rp.270,135,770,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Komponen kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian IKK 8 pada tahun 2023 adalah inventarisasi wilayah dan verifikasi kemitraan konservasi melalui identifikasi karakteristik lokasi potensi blok tradisional (penandaan

batas lokasi kemitraan konservasi). Sesuai dengan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu berupa kegiatan penandaan batas lokasi kemitraan konservasi di kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi, target capaian IKK 8 dapat dicapai 100%.

9. IKK 9 : Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam sejumlah 5 orang

BBKSDA Jabar pada tahun 2023 memperoleh target jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam sejumlah 5 orang. Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKK ini adalah sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), realisasi sebesar 100% atau seluruhnya terserap untuk digunakan kegiatan pengembangan kader konservasi melalui pembentukan kader konservasi tingkat Madya.

Pembentukan kader konservasi tingkat madya dilaksanakan pada bulan September 2023 yang diikuti dengan peningkatan kapasitas kader konservasi tingkat madya lingkup BBKSDA Jabar sejumlah 20 orang. Sehingga target IKK jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam tercapai 400%. Data capaian IKK jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam yang dapat dilaporkan pada aplikasi SAKTI sebesar 100% adalah sejumlah 5 orang.

10. IKK 10 : Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya sejumlah 21 kelompok

Peraturan Dirjen KSDAE Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyebutkan kemitraan kehutanan di dalam kawasan konservasi atau yang dikenal dengan kemitraan konservasi merupakan kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Tujuan kemitraan konservasi adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati. Ruang lingkup kemitraan konservasi yang diatur

dalam peraturan ini mencakup kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.

Tahun 2023 BBKSDA Jabar memiliki target sebanyak 21 kelompok unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya. Guna mendukung pencapaian target tersebut Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.298.375.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terealisasi 31,06% atau sebesar Rp.92.680.340,- (sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

11.IKK 11 : Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya sejumlah 24 unit KK

Evaluasi terhadap pengelolaan kawasan konservasi menjadi satu diantara kunci penerapan sistem pengelolaan yang adaptif. Melalui aktivitas evaluasi, pengelolaan kawasan konservasi diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, pelibatan para pihak, kerjasama dan berbagi pengetahuan yang akan bermanfaat bagi pengelolaan kawasan konservasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, penilaian efektivitas kawasan konservasi dilakukan dengan menggunakan perangkat *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Elemen penilaian yang digunakan dalam METT adalah *context, planning, input, process, output* dan *outcome*.

Mengacu pada dokumen perjanjian kinerja 2023, pada tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target sebanyak 24 kawasan konservasi yang harus ditingkatkan efektivitas pengelolaannya sesuai Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.3/KSDAE/PKK/KSA.1/1/2023 Tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Sampai Dengan Tahun 2022 dan surat Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Nomor: S.47/PKH/PPKH/KSA.1/3/2023 tanggal 23 Maret 2023 perihal penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2023, dimana kawasan konservasi yang harus

dinilai peningkatan efektifitas pengelolaannya adalah sebanyak 24 Kawasan Konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Guna mendukung pencapaian target kinerja tersebut, pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.65.500.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tercapai 100% atau terserap seluruhnya.

Sesuai arahan tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah melaksanakan penilaian mandiri sebanyak 24 kawasan konservasi di 3 Bidang KSDA Wilayah dan 4 Taman Hutan Raya, atau secara keseluruhan target capaian IKK 11 dapat tercapai 100%. Rekapitulasi Hasil penilaian mandiri efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 8 Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat per Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap nilai efektifitas pengelolaan kawasan, terdapat 17 kawasan konservasi dengan nilai METT $\geq 70\%$, yaitu CA telaga warna, SM Cikepuh, TWA P Sangiang, TWA Talaga Warna, TWA Jember, TWA Sukawayana, CA Gn Burangrang, CA Gn. Tilu, CA Telaga Patengan, TB Gn. Masigit Kareumbi, TWA Cimanggu, CA Telaga Bodas, CA Leuweung Sancang, CA Kawah Kamojang, SM Gn. Sawal, SM Sindangkerja, TWA Gn. Papandayan. Sementara itu, terdapat 4 kawasan konservasi dengan nilai METT antara 60 – 70%, yaitu CA Takokak, CA Gn. Jagat, CA Gn. Papandayan, TWA Gn. Guntur serta terdapat 3 kawasan dengan nilai METT antara 50-60%, yaitu CA Dungus Iwul, CA Yan Lapa dan TWA Telaga Patengan.

12.IKK 12 : Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 100 hektar

Mengacu pada Renstra BBKSDA Jabar (2020-2023) dan Perjanjian Kinerja 2023 target IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi adalah seluas 100 hektar. BBKSDA Jabar dalam mencapai target tersebut, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), terealisasi 99,89% atau sebesar Rp. 79.910.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). IKK luas penanganan konflik

tenurial di kawasan konservasi dilakukan melalui pemantauan kegiatan kemitraan konservasi di kawasan Taman Buru Gunung Masigit.

13.IKK 13 : Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran sejumlah 48 unit kawasan konservasi

Pada tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target kinerja sejumlah 48 unit kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan. Anggaran yang diperoleh BBKSDA Jabar untuk memenuhi target IKK ini adalah sebesar Rp.1.089.760.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), mencapai realisasi 99,66% atau sebesar Rp. 1.086.052.618,- (satu milyar delapan puluh enam juta lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pengendalian kebakaran hutan konservasi. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan meliputi survey potensi kawasan secara partisipasi bersama masyarakat dalam rangka SMART Patrol, patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik tenurial.

14.IKK 14 : Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 208.548 hektar

Balai Besar KSDA Jawa Barat, terkait dengan keanekaragaman hayati tinggi, mendapatkan tanggungjawab capaian target seluas 208.548 ha yang harus diinventarisasi dan diverifikasi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi. Untuk mencapai target IKK tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp.658.898.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terealisasi 99,94% atau terserap sebesar Rp.658.480.350,- (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:

1. Inventarisasi kehati bernilai tinggi di dalam kawasan konservasi;

2. Monitoring satwa;
3. Dukungan pemulihan populasi penyu pada habitat semi alami di SM Cikepuh, TWA Sangiang dan SM Sindangkerta;
4. Pembinaan habitat dalam rangka reintroduksi banteng.

Identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati menjadi langkah awal kegiatan untuk mengetahui lokasi-lokasi di dalam dan di luar kawasan konservasi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi tidak dapat seluruhnya dilaksanakan, dikarenakan *refocusing* anggaran yang mengharuskan ketersediaan anggaran untuk inventarisasi di luar kawasan konservasi disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga untuk tetap dapat mencapai target kinerja, kegiatan inventarisasi di luar kawasan konservasi dilaksanakan melalui *on desk study*.

Hasil inventarisasi kawasan dengan keanekaragaman hayati bernilai tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi menunjukkan capaian seluas 310.238,18 ha. (tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh delapan dan delapan belas per seratus hektar). Capaian luasan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan seluas 208.548 ha. (dua ratus delapan ribu lima ratus empat puluh delapan hektare), dengan demikian target kinerja mencapai 149%.

15.IKK 15 : Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 40 entitas

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, serta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengamankan kegiatan perizinan berusaha dilakukan melalui sistem *One Single Submission* (OSS).

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai bagian dari perizinan berusaha di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diantaranya adalah:

1. penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
2. peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri;
3. peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar luar negeri.

Indikator kinerja kegiatan jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL tahun 2023 adalah sejumlah 40 entitas. Guna memenuhi target tersebut Balai Besar KSDA Jabar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.182.240.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), terealisasi 99,29% atau sebesar Rp.180.949.939,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang dipergunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi izin dalam negeri, monev dan penilaian kelayakan izin edar luar negeri, serta survey dan analisa pengumpulan kuota., dengan rincian sebagai berikut:

1. Monev pengedar luar negeri sejumlah 20 entitas;
2. Monev dan koordinasi ke pengedar dalam negeri sejumlah 12 entitas;
3. Audit penangkar sejumlah 6 entitas;
4. Koordinasi dalam rangka identifikasi kuota sejumlah 5 entitas.

Capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dari tahun 2020-2023 cenderung naik dan melampaui target. Tahun 2023 tercapai sebesar 107.5%.

16.IKK 16 : Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 12 entitas entitas

Indikator kinerja kegiatan jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL tahun 2023 adalah sejumlah 12 entitas. Guna memenuhi target tersebut BBKSDA Jabar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.56.780.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), terealisasi 99,87% atau sebesar Rp.56.705.500,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah), yang

dipergunakan untuk kegiatan penilaian kelayakan izin penangkaran dan money lembaga konservasi umum.

Terhadap 12 entitas pemegang izin lembaga konservasi umum telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, rekom lembaga konservasi, *self assessment* dan rekom perolehan sebagaimana tabel 13. Kegiatan tersebut telah memenuhi *verifier* capaian terhadap IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berupa hasil *self assessment* penilaian lembaga konservasi, laporan evaluasi lembaga konservasi, rekomendasi perolehan satwa bagi lembaga konservasi, laporan hasil penilaian kelayakan penangkaran non komersial. Sehingga dapat disimpulkan IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL telah memenuhi target yaitu sejumlah 12 entitas atau sebesar 100%.

17. IKK 17 : Jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 10 kejadian

Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2023 memperoleh target jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 10 kejadian. Untuk mendukung capaian IKK ini BBKSDA Jabar memperoleh anggaran sebesar Rp.453.302.000, (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah), terealisasi 99,68% atau sebesar Rp.451.845.615,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah), digunakan untuk melaksanakan kegiatan:

1. evakuasi dan penyelamatan TSL;
2. penanganan konflik satwa liar dan manusia (WRU);
3. pembuatan kandang habituasi.

Berdasarkan rekapitulasi data evakuasi dan penyelamatan TSL lingkup wilayah BBKSDA Jabar, terdapat 122 satwa yang dititip rawatkan pada lembaga konservasi dan 127 satwa yang dilepasliarkan selama tahun 2023 (gambar 54). Hal ini menunjukkan target IKK jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 10 kejadian tercapai melampaui target sejumlah 150%.

18.IKK 18 : Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary Education sebanyak 1 destinasi

Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh target jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary Education* sebanyak 1 destinasi yang berlokasi di TWA Pulau Sangiang. Guna mencapai target, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.709.010.000,- (tujuh ratus sembilan juta sepuluh ribu rupiah), terealisasi 98,38% atau sebesar Rp.697.553.938,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah). Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKK jumlah destinasi wisata alam science, academic, voluntary education adalah sebagai berikut:

1. Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang terdiri dari kegiatan monitoring dan evaluasi IUPSWA serta Pengelolaan wisata alam berbasis SAVE;
2. Pengembangan eco edutourism terdiri dari kegiatan kelola PNBPN lingkup BBKSDA Jabar, peningkatan pelayanan pengunjung pada hari raya/libur nasional;
3. Informasi dan promosi pengelolaan wisata alam berbasis SAVE melalui kegiatan pembuatan film pendek promosi TWA dan Pameran dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional.

Kegiatan monitoring dan evaluasi IUPSWA PT. Pondok Kalimaya Putih di TWA Sangiang dilaksanakan pada tanggal 23-28 Juli 2023. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan inventarisasi aset (sarana prasarana) dan pembinaan terhadap PT. Pondok Kalimaya Putih di Pulau Sangiang pasca berakhirnya IUPSWA PT Pondok Kalimaya Putih. IUPSWA PT Pondok Kalimaya Putih berakhir pada tanggal 26 Desember 2022 dan mengalami keterlambatan perpanjangan izin, dimana saat ini status izin PT. Pondok Kalimaya Putih masih dalam proses perpanjangan.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan kawasan menyampaikan bahwa dokumen perencanaan TWA Pulau Sangiang belum lengkap, dimana dokumen RPJP Kawasan dan desain tapak sebagai dasar pembagian ruang antara kepentingan ruang usaha dan ruang publik yang diperlukan bagi pemberian persetujuan perusahaan wisata alam masih

dalam proses pengesahan Dirjen KSDAE untuk dokumen RPJP dan Direktur PJKK untuk Desain Tapak. Hasil inventarisasi aset operasionalisasi IUPSWA PT Pondok Kalimaya Putih dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor:BA-642/K.1-BIDTEK/KSA/07/2023, dilaporkan di TWA Pulau Sangiang terdapat sarana dan fasilitas kepariwisataan berupa *community center*, mess, gazebo, dan jogging track dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Dengan dilaksanakannya rangkaian komponen kegiatan diatas, IKK jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary Education* dengan target sebanyak 1 destinasi tercapai 100%.

19.IKK 19 : Luas ekosistem yang dipulihkan seluas 905,19 hektar

Berkaitan dengan IKK luas ekosistem yang dipulihkan Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2023 memiliki target seluas 905,19 hektar. Kegiatan pemulihan ekosistem yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Tujuan pemulihan ekosistem penyusun KSA dan KPA adalah untuk mengembalikan sepenuhnya integritas ekosistem kembali ke tingkat/kondisi aslinya atau kepada kondisi masa depan tertentu (*Desired Future Condition/DFC*) sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan.

Anggaran yang diperoleh Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk memenuhi target IKK 19 tahun 2023 adalah sebesar Rp.354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah), terealisasi 99,89% atau sebesar Rp.353.623.431,- (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang pertama digunakan untuk menyiapkan bibit tanaman pengkayaan sejumlah 60.000 batang pohon endemik dan asli setempat, yang terbagi pada 3 (tiga) Bidang KSDA Wilayah atau masing-masing sejumlah 20.000 batang bibit pohon; kedua digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dan penanaman pengkayaan bersama masyarakat. Kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dilakukan melalui kegiatan patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait pemulihan ekosistem. Terhadap tanaman sejumlah 20.000 batang pada di

setiap Bidang KSDA Wilayah, ditanam melalui pengkayaan pada saat patroli rutin dilaksanakan, sebagaimana kolom Penanaman (Ha.)

Total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan pada Tahun 2023 tercapai seluas 1.501,64 ha dengan rincian 1.265,63 ha melalui mekanisme alam dan 236,01 ha melalui penanaman atau tercapai 150%.

20.IKK 20 : Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sejumlah 2 unit KEE

Pada tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki IKK jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya dengan target sebanyak 2 unit KEE. Alokasi anggaran yang diperoleh untuk mencapai target tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terealisasi 99,76% atau sebesar Rp.199.520.349,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan:

1. Penyusunan DED Taman Kehati Kota Cirebon;
2. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar taman kehati Nagrog Kab. Bandung;
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat Taman Kehati Kiara Payung di Kab. Sumedang.

Capaian IKK Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya di bawah ini, dapat dilihat target IKK jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya pada tahun 2020-2022 tercapai 100%, adapun pada tahun 2023 capaian IKK meningkat menjadi 150%.

B. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2024

Prognosis Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan kehutanan bidang KSDAE pada BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024 sebagai berikut pada tabel berikut:

Tabel 3. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2024

KODE	Program/Kegiatan/KRO/RO	Satuan	Target	Prediksi
029.05.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup			
6743	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial			
6743.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			
6743.PBJ.001	Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi kebijakan	1
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
5423.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
5423.RAG.002	Destinasi wisata alam science, academic, voluntary, education yang dikembangkan penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	1	Unit, Dokumen, Kegiatan	1
6739	Perencanaan Kawasan Konservasi			
6739.AEC	Kerja sama			
6739.AEC.001	Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	1	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1
6739.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan			
6739.PBV.004	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	1	Rekomendasi kebijakan	1
6739.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			
6739.REA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	11.000	Hektar	11.000
6740	Pengelolaan Kawasan Konservasi			
6740.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan			
6740.PBV.001	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	23	Rekomendasi kebijakan	23
6740.PBV.002	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	48	Rekomendasi kebijakan	48
6740.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
6740.QDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	21	Lembaga	21
6740.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
6740.QDC.001	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	5	Orang	5
6740.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			
6740.QDD.001	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	21	Kelompok Masyarakat	21
6740.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			

KODE	Program/Kegiatan/KRO/RO	Satuan	Target	Prediksi
6740.REA.001	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	500	hektar	500
6740.REA.002	Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	100	hektar	100
6741	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik			
6741.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
6741.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	12	Lembaga	12
6741.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	40	lembaga	40
6741.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			
6741.REA.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	208.548	Hektar	208.548
6741.REB	Konservasi Jenis/Spesies			
6741.REB.001	Penyelamatan Satwa Liar	10	lokasi	10
6742	Pemulihan Ekosistem			
6742.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			
6742.REA.002	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	905,19	Hektar	905,19
029.05.WA	Program Dukungan Manajemen			
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem			
5419.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
5419.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1
5419.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1

BAB III. RENCANA KERJA

A. Rencana Kerja

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 diarahkan untuk memenuhi sasaran pembangunan nasional yang dirangkum dalam tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian berupaya untuk menginternalisasi pembangunan nasional tahun 2024 kedalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga setiap entitas tapak mampu memproduksi barang/jasa yang pada akhirnya dapat menumbuhkan geliat ekonomi dan kondisi lingkungan serta kehidupan sosial yang semakin baik. Untuk itu, *milestone* pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2024 diringkas dalam narasi utama pendulum perubahan yang mengayunkan geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah.

Pada Tahun 2024 sasaran yang harus dicapai BBKSDA Jawa Barat mengacu pada Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tabel 4 berikut.

Tabel 4. Indikator Kinerja dan Komponen Kegiatan Pencapaian Kinerja

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Biaya
	PAGU		38.420.502.000
029.05.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		75.000.000
6743	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial		75.000.000
6743.REA.001	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	68,487 Hektar	75.000.000
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		10.109.795.000
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi		1.562.500.000
5423.QAH.001	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	2 Dokumen	112.500.000
5423.QDD.001	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata	1 Kelompok Masyarakat	598.100.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Biaya
5423.RBK.002	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	1 Unit	851.900.000
6739	Perencanaan Kawasan Konservasi		1.003.000.000
6739.AEC.001	Tata Kelola Kerja Sama di Kawasan Konservasi	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	80,000,000
6739.QDB.001	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	1 Unit Kerja	683.000.000
6739.REA.001	Kawasan Konservasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	38.358 Hektar	240.000.000
6740	Pengelolaan Kawasan Konservasi		5.616.000.000
6740.QAB.001	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	22 Unit Kerja	66,000,000
6740.QDC.001	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	4 Orang	110.000.000
6740.QDD.001	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	21 Kelompok Masyarakat	150.000.000
6740.QEH.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Sekitar Kawasan Konservasi	30 Kelompok Masyarakat	2.020.000.000
6740.QHD.001	Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	48 Operasi	2.900.000.000
6740.REA.002	Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang ditangani	2.518 hektar	370.000.000
6741	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik		1.430.000.000
6741.QDB.001	Entitas Perlindungan dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang Dikembangkan	27 Lembaga	170.000.000
6741.QDB.002	Entitas Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL yang dikembangkan (Koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	46 lembaga	510.000.000
6741.REA.001	Kawasan Perlindungan	100.990 Hektar	400.000.000

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Biaya
	Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL		
6741.REB.001	Penyelamatan Satwa Liar	6 Lokasi	350.000.000
6742	Pemulihan Ekosistem		498.295.000
6742.REA.002	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	200 Hektar	498.295.000
029.05.WA	Program Dukungan Manajemen		28.235.707.000
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		28.235.707.000
5419.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1.000.000.000
5419.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	27.235.707.000

B. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$C = \frac{R}{T} \times 100 \%$$

dimana,

- C : Tingkat capaian target kinerja
- R : Realisasi capaian target kinerja
- T : Target kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$C = \frac{T - (R - T)}{T} \times 100 \%$$

dimana,

C : Tingkat capaian target kinerja

R : Realisasi capaian target kinerja

T : Target kinerja

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 100% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari BBKSDA Jawa Barat.

C. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan program Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem pada BBKSDA Jawa Barat pada Tahun 2024, sebagaimana pagu definitive Tahun 2024, direncanakan sebesar Rp. **38.420.502.000,-** (*Tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua ribu rupiah*).

Alokasi pagu definitif tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran. Uraian rencana pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan, Output, Komponen dan Sub Komponen Kegiatan BBKSDA Jawa Barat.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024 yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan pada BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024.

Renja ini merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) BBKSDA Jawa Barat, yang hingga saat ini penyusunannya masih mengacu pada rancangan teknokratik. Walaupun Renstra yang diacu masih bersifat tentatif, Renja ini tetap merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Namun demikian, apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai arahan dari Direktorat Jenderal KSDAE – Kementerian LHK.

Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2024, Renja ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024. Untuk proses selanjutnya masih diperlukan penyesuaian-penyempurnaan sehubungan dengan kemungkinan akan adanya perubahan arah kebijakan pemerintah serta adanya perubahan-perubahan prioritas dalam APBN Tahun 2024 dan kondisi eksisting regulasi dan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini. Hal-hal tersebut perlu mendapat prioritas dalam penanganannya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip relevan, efektif, efisien, fleksibel, dan bermanfaat.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat
